

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Penonaktifan KTP Warga Jakarta untuk Antisipasi Kerugian Daerah

Gambir, Warta Kota

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI terus melakukan penataan administrasi kependudukan warga Jakarta.

Salah satu cara penataannya adalah dengan menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Jakarta yang sudah sudah pindah alamat tempat tinggal.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, penataan tersebut guna mengurangi potensi kerugian daerah, serta potensi penyalahgunaan dokumen kependudukan.

Heru Budi Hartono mengakui, Pemprov DKI sudah menonaktifkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Jakarta yang sudah pindah alamat sebanyak 213.831 jiwa.

"Jumlah ini diprediksi masih akan terus bertambah mengingat banyak warga yang ber-KTP Jakarta, tetapi secara faktual sudah tidak tinggal di Jakarta," katanya, Senin (27/5/2024).

Meski demikian, Heru Budi

Hartono tidak melarang warga dari berbagai daerah untuk datang ke Jakarta. Namun, kata Heru, tidak boleh memanfaatkan KTP yang tidak sesuai aturan yang berlaku atau tidak sesuai domisili.

"Penataan dan penertiban yang dilakukan oleh Disdukcapil Pemprov Jakarta adalah dalam rangka menjaga keakuratan data kependudukan sehingga stakeholder pengguna KTP dalam layanannya dapat tervalidasi dengan baik," jelasnya.

Sedangkan Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang selama ini menjadi pemanfaat data kependudukan.

"Dalam rangka menyukseskan program penataan dan penertiban administrasi kependudukan, Disdukcapil akan terus melakukan pendekatan kepada para stakeholder yang mempergunakan NIK dalam layanannya," kata Budi.

"Hal ini dilakukan untuk menjamin keakuratan data kependudukan bagi institusi pengguna layanan dasar melalui NIK," tambahnya.

Budi melanjutkan, KTP dimanfaatkan dan digunakan dalam berbagai layanan seperti layanan BPJS, pendidikan, surat kendaraan bermotor, surat ijin mengemudi, perbankan, kepemilikan paspor, dan lain-lain.

Oleh karenanya, keakuratan data kependudukan tersebut dianggap sangat penting demi menjaga keamanan dan validasi kepemilikan KTP. (m26)